

BAB VI PENUTUP

6. 1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas maka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemic Covid-19 di Desa Noelbaki dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian implementasi asas akuntabilis pelaksanaan BLT-DD yang ada di Desa Noelbaki telah sesuai dengan arahan Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 yaitu :
 - a) Indikator pertama Melaksanakan pendataan Calon penerima BLT-DD, berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah melaksanakan pendataan yang dilakukan oleh ketua RT.
 - b) Indikator kedua Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-DD, berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah melaksanakan verifikasi dan validasi status kependudukan calon penerima BLT-DD dengan melaksanakan Musdesus.
 - c) Indikator ketiga Kasi/kaur pelaksanaan kegiatan anggaran menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah disetujui oleh kepala desa.

- d) Indikator keempat Mekanisme penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan non-tunai. Berdasarkan penelitian di lapangan Di Desa Noelbaki pada tahun 2020 penyaluran BLT-DD secara non tunai dan pada tahun 2021 dan 2022 penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai yang dilaksanakan di aula kantor desa.
 - e) Indikator kelima Penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah Penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang yaitu pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang.
2. Berdasarkan hasil penelitian implementasi asas transparansi pelaksanaan BLT-DD yang ada di Desa Noelbaki belum sepenuhnya sesuai dengan arahan Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 yaitu :
- a) Kepala Desa Noelbaki memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD. Berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah melaksanakan musdesus dengan mengundang mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD.
 - b) Pemerintah desa menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD yang sudah disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat. Berdasarkan penelitian dilapangan

Pemerintah Desa Noelbaki tidak menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD yang sudah disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat.

6. 2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Noelbaki seharusnya menyebarkan informasi terkait dengan penyaluran BLT-DD ataupun informasi terkait desa kepada masyarakat melalui papan informasi atau sistem informasi desa dan sebaiknya pemerintah Desa Noelbaki membuat situs website terkait dengan kebijakan atau tentang pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menciptakan faktor tidak diterapkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020 dalam pelaksanaan BLT-DD

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Putu. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengeolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupater Buleleng. eJournal, Vol : 8 No 2
- Agoes, Cenik. Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Salemba Empat: Jakarta
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 874-885.
- Dwijowijoto, R.N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Editor Agus Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasniati, 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisi dan Pelayanan Publik*:Vol.2, No 1, Juni 2016-pISSN:2460-6162 | eISSN: 2527-6476
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- LAN & BPKP. 2020. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta:ANDY* Yogyakarta.
- Medina. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia : Jakarta
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Pamungkas, Binar Dwiyanto, S. 2020. "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbawa". *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 1 No. 2: 96-108.

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa

Rizal. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 44-56.

Ratminto dan Winarsih, A. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sari, N. N. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Sujarweni, Wiratna. 2019. *AKUNTANSI DESA Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Jl. Wonosari Km 6, RT 04, Demblaksari, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Sutanto, Heri, and Pancawati Hardiningsih. "Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19." *InFestasi* 17.1 (2021): 1-10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa